



**PENETAPAN**

Nomor 132/Pdt.P/2022/PA.Lik

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Lolak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**Rosminah binti Husaini**, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 05 Agustus 1979, agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xll, xxxxx xxxxxxx xxxxxx, Kecamatan Dumoga Barat, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx sebagai **Pemohon I**;

**Asma Mashanafi binti Said Mashanafi**, tempat dan tanggal lahir Ikhwan, 06 Juni 1982, agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, tempat kediaman di xxxxx x, Desa Ikhwan, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, Anak Pemohon I, Anak Pemohon II, serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 13 Juli 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lolak pada tanggal 13 Juli 2022 dengan Nomor 132/Pdt.P/2022/PA.Lik, telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I hendak menikahkan anak kandung Pemohon I :

Nama : **Aji Saputro bin Suyatno**

Hal. 1 dari 22 hal. Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2022/PA.Lik  
Selasa, 19 Zulhijah 1443 Hijriah / 19 Juli 2022 Masehi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal lahir : 03 Mei 2005 (umur 17 Tahun)  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Petani  
Alamat : xxxxx xxx, Desa Toraut Utara, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,  
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

dengan calon istrinya Anak Kandung Pemohon II :

Nama : **Rini Ponamon binti Siton Ponamon**  
Tanggal lahir : 13 Juni 2004 (umur 18 Tahun)  
Agama : Islam  
Pekerjaan : xxxxx xxx  
Alamat : xxxxx x, xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,  
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

2. Bahwa, alasan para Pemohon bermaksud segera menikahkan Anak Pemohon dengan calon Istrinya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak **24 November 2021** sampai sekarang Anak Pemohon I dan Pemohon II sudah pernah melakukan hubungan biologis layaknya suami istri dan dalam keadaan hamil 5 (lima) bulan;
3. Bahwa antara Anak kandung Pemohon II dan calon suaminya anak Pemohon I tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa Anak Pemohon II berstatus gadis, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitupun calon suaminya berstatus Jejak dan sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga;
5. Bahwa keluarga Pemohon I dan keluarga Anak Pemohon II telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut karena Anak Pemohon II telah dilamar oleh calon suaminya **Aji Saputro bin Suyatno**;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon I dan anak Pemohon II pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon I dan Anak Pemohon II belum cukup umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan anak

Hal. 2 dari 22 hal. Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2022/PA.Lik  
Selasa, 19 Zulhijah 1443 Hijriah / 19 Juli 2022 Masehi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I Nomor : **B\_217/KUA.23.01.11/PW.01/7/2022**, Tanggal **12 Juli 2022** dan Surat Penolakan anak Pemohon II Nomor : **B\_219/KUA.23.01.11/PW.01/7/2022**, Tanggal **12 Juli 2022**, maka oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lolak dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Anak Pemohon II tersebut;

7. Bahwa agar pernikahan anak Pemohon I dengan calon istrinya: **Rini Ponamon binti Siton Ponamon**, Anak Pemohon II sangat mendesak untuk segera dilaksanakan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lolak segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon I yang bernama (**Aji Saputro bin Suyatno**) untuk menikah dengan Anak Pemohon II (**Rini Ponamon binti Siton Ponamon**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap ke persidangan dengan menghadirkan pula Anak Pemohon I dan Anak Pemohon II yang dimintakan dispensasi kawinnya;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat terkait permohonan dispensasi kawin berdasarkan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan, untuk memastikan orang tua dan anak-anaknya memahami risiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap Anak Pemohon I dan Anak Pemohon II dalam masalah pendidikan dan kesehatan diantaranya: kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga disarankan untuk menunda pernikahan sampai kedua calon mempelai cukup umur agar tercapai dan terjaminnya rumah tangga yang sakinah, mawadah dan penuh rahmat, akan tetapi atas nasihat tersebut, Pemohon I dan Pemohon II serta anak Pemohon I yang dimintakan dispensasi dan Anak Pemohon II yang juga dimintakan

Hal. 3 dari 22 hal. Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2022/PA.Llk  
Selasa, 19 Zulhijah 1443 Hijriah / 19 Juli 2022 Masehi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dispensasi, menyatakan telah memahaminya dan tetap berkeinginan untuk melanjutkan pernikahan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II serta menyatakan pihaknya merestui pernikahan antara keduanya dan siap membimbing;

Bahwa telah didengar keterangan calon mempelai pria yakni anak Pemohon I yang bernama **Aji Saputro**, yang menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah anak kandung Pemohon I yang dimintakan dispensasi nikahnya karena masih berusia 17 tahun 2 bulan 16 hari, namun telah menjalin hubungan dekat dengan seorang gadis bernama **Rini Ponamon** sejak November 2021 dan telah siap menikah;
- Bahwa hubungannya dengan **Rini Ponamon** sangat dekat dan **Rini Ponamon** telah hamil 5 (lima) bulan karena hubungan tersebut;
- Bahwa Anak Pemohon I dan **Rini Ponamon** telah yakin akan terjerumus dalam perzinahan apabila keduanya tidak segera dinikahkan;
- Bahwa tidak ada unsur tekanan dan paksaan maupun transaksional dalam rencana pernikahan anak Pemohon I dengan **Rini Ponamon**, karena rencana pernikahan ini atas persetujuan dan murni keinginan kedua calon mempelai;
- Bahwa keluarganya merestui hubungan tersebut;
- Bahwa ia beragama Islam;
- Bahwa ia sudah melamar **Rini Ponamon** dengan datang dan bertemu keluarganya, keluarga Pemohon II menerima lamaran tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan dengan lamaran tersebut;
- Bahwa antara anak Pemohon I dengan **Rini Ponamon** tidak ada hubungan nasab/sedarah, sepersusuan, tidak dalam ikatan perkawinan atau pinangan orang lain atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa status anak Pemohon I adalah jejaka serta siap lahir dan batin bertanggungjawab sebagaimana layaknya seorang suami atau kepala keluarga dan telah bekerja sebagai Penambang dengan penghasilan perbulan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Hal. 4 dari 22 hal. Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2022/PA.Llk  
Selasa, 19 Zulhijah 1443 Hijriah / 19 Juli 2022 Masehi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa telah didengar keterangan calon mempelai wanita yakni anak Pemohon II yang bernama **Rini Ponamon**, yang menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah anak kandung Pemohon II yang saat ini adalah gadis berusia 18 tahun 1 bulan 6 hari sedang dimohonkan dispensasi nikahnya;
- Bahwa sejak November 2021 anak Pemohon II telah menjalin hubungan percintaan dengan lelaki bernama **Aji Saputro**;
- Bahwa antara dirinya dengan **Aji Saputro** sering bertemu dan merasa cocok;
- Bahwa dirinya ingin segera menikah karena hubungannya dengan **Aji Saputro** sudah sangat erat dan anak Pemohon telah hamil 5 (lima) bulan;
- Bahwa ia dan **Aji Saputro** telah yakin akan terjerumus dalam perzinahan apabila keduanya tidak segera dinikahkan;
- Bahwa tidak ada unsur tekanan dan paksaan maupun transaksional dalam rencana pernikahannya dengan **Aji Saputro**, karena rencana pernikahan ini atas persetujuan dan murni keinginan kedua calon mempelai;
- Bahwa keluarga **Aji Saputro** telah merestui hubungan keduanya;
- Bahwa antara dirinya dengan **Aji Saputro** tidak ada hubungan nasab/sedarah, sepersusuan, tidak dalam ikatan perkawinan atau pinangan orang lain atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa dirinya beragama Islam;
- Bahwa saat ini dirinya telah siap lahir dan batin bertanggung jawab sebagaimana layaknya seorang istri dan ibu rumah tangga;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat-Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Rosminah** (Pemohon I), NIK: 7101094508790001 tertanggal 09 September 2013 yang cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen, diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Asma Mashanafi** (Pemohon II), NIK: 7101095006330211 tertanggal 31 Oktober

Hal. 5 dari 22 hal. Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2022/PA.Lik  
Selasa, 19 Zulhijah 1443 Hijriah / 19 Juli 2022 Masehi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 yang cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan di-nazegelen, diberi kode P.2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama **Siton Ponamon** (Ayah Anak Pemohon II) dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor: 7101-KM-03102016-0001 Tanggal 03 Oktober 2016 yang cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup dan di-nazegelen, diberi kode P.3;

4. Asli Surat Penolakan Perkawinan kepada **Suyatno** dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dumoga Barat, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, nomor **B\_217/KUA.23.01.11/PW.01/7/2022**, Tanggal **12 Juli 2022**, bermeterai cukup serta telah di-nazegelen, diberi kode P.4;

5. Asli Surat Penolakan Perkawinan kepada wali **Asma Mashanafi** dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dumoga Barat, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, nomor **B\_219/KUA.23.01.11/PW.01/7/2022**, Tanggal **12 Juli 2022**, bermeterai cukup serta telah di-nazegelen, diberi kode P.5;

6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Suyatno** dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor: 7101090305130002 Tanggal 06 Maret 2019 yang cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan di-nazegelen, diberi kode P.6;

7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Sudin Paputungan** (Suami Pemohon II) dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor: 7101090702170022 Tanggal 28 Desember 2018 diberi kode P.7;

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Aji Saputro** (Anak Pemohon I) dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor: 2763/I/2011 Tanggal 18 Maret 2011 yang cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup dan di-nazegelen, diberi kode P.8;

9. Fotokopi Surat Keterangan Menikah atas nama **Suyatno** dan **Rosminah** dari Kepala xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor: 050/DTU/SKM/VII/2022

Hal. 6 dari 22 hal. Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2022/PA.Lik  
Selasa, 19 Zulhijah 1443 Hijriah / 19 Juli 2022 Masehi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 11 Juli 2022 yang cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup dan di-nazegelen, diberi kode P.9;

10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Rini Ponamon** (Anak Pemohon II) dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor: 7101-LT-06012014-0022 Tanggal 06 Januari 2014 yang cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup dan di-nazegelen, diberi kode P.10;

11. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dumoga Barat, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, Nomor: 109/02/X/2016 tertanggal 04 Oktober 2016 yang cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan di-nazegelen, diberi kode P.11;

12. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama **Aji Saputro** dari Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri Tapa Aog, Kecamatan Lolayan, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, tertanggal 07 Juli 2020 yang cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup dan di-nazegelen, diberi kode P.12;

13. Fotokopi Surat Keterangan Tamat SMP atas nama **Rini Ponamon** dari Kepala SMP 5 Negeri Dumoga, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, Nomor 120/C.8/SMPN5DMG/2019 tertanggal 31 Mei 2019 yang cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup dan di-nazegelen, diberi kode P.13;

14.-----

Saksi:

15. **Susanti Humena binti Hamsah Humena** umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II serta anak Pemohon I dan anak Pemohon II karena saksi adalah keponakan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon II hendak menikahkan anaknya yang bernama **Rini Ponamon** dengan anak Pemohon I yang bernama **Aji Saputro**, namun anak Pemohon I dan anak Pemohon II

Hal. 7 dari 22 hal. Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2022/PA.Llk  
Selasa, 19 Zulhijah 1443 Hijriah / 19 Juli 2022 Masehi



tersebut belum cukup umur karena itu memerlukan penetapan pengadilan;

- Bahwa saksi melihat antara anak Pemohon I dan anak Pemohon II sudah menjalin cinta sejak November 2021, antara keduanya sangat dekat;
- Bahwa keluarga Pemohon I maupun keluarga Pemohon II sudah merestui dan siap membimbing;
- Bahwa tidak ada unsur tekanan dan paksaan maupun transaksional dalam rencana pernikahan **Aji Saputro** dengan **Rini Ponamon**, karena rencana pernikahan ini murni keinginan keduanya;
- Bahwa antara anak Pemohon I dan anak Pemohon II tidak ada hubungan nasab/sedarah maupun sepersusuan atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa status anak Pemohon I adalah jejaka sedangkan anak Pemohon II adalah gadis yang tidak terikat perkawinan atau pinangan orang lain;
- Bahwa saksi melihat anak Pemohon I memiliki kesiapan mental untuk membangun rumah tangga dan siap untuk bertanggung jawab sebagaimana layaknya seorang suami dan menjadi kepala rumah tangga;
- Bahwa saksi melihat Anak Pemohon II memiliki kesiapan mental untuk membangun rumah tangga dan siap untuk bertanggung jawab sebagaimana layaknya seorang istri atau menjadi ibu rumah tangga, karena sering membantu ibunya mengurus rumah;
- Bahwa **Aji Saputro** telah bekerja sebagai Penambang.

**16. Samia Londa binti Madi Londa** umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II serta anak Pemohon I dan anak Pemohon II karena saksi ibu Kandung Pemohon II;

Hal. 8 dari 22 hal. Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2022/PA.Llk  
Selasa, 19 Zulhijah 1443 Hijriah / 19 Juli 2022 Masehi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon II hendak menikahkan anaknya yang bernama **Rini Ponamon** dengan anak Pemohon I yang bernama **Aji Saputro**, namun anak Pemohon I dan anak Pemohon II tersebut belum cukup umur karena itu memerlukan penetapan pengadilan;
- Bahwa saksi melihat antara anak Pemohon I dan anak Pemohon II sudah menjalin cinta sejak November 2021, antara keduanya sangat dekat;
- Bahwa keluarga Pemohon I maupun keluarga Pemohon II sudah merestui dan siap membimbing;
- Bahwa tidak ada unsur tekanan dan paksaan maupun transaksional dalam rencana pernikahan **Aji Saputro** dengan **Rini Ponamon**, karena rencana pernikahan ini murni keinginan keduanya;
- Bahwa antara anak Pemohon I dan anak Pemohon II tidak ada hubungan nasab/sedarah maupun sepersusuan atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa status anak Pemohon I adalah jejaka sedangkan anak Pemohon II adalah gadis yang tidak terikat perkawinan atau pinangan orang lain;
- Bahwa saksi melihat anak Pemohon I memiliki kesiapan mental untuk membangun rumah tangga dan siap untuk bertanggung jawab sebagaimana layaknya seorang suami dan menjadi kepala rumah tangga;
- Bahwa saksi melihat Anak Pemohon II memiliki kesiapan mental untuk membangun rumah tangga dan siap untuk bertanggung jawab sebagaimana layaknya seorang istri atau menjadi ibu rumah tangga, karena sering membantu ibunya mengurus rumah;
- Bahwa **Aji Saputro** telah bekerja sebagai Penambang.

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak mengajukan bukti apa pun lagi kemudian menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon penetapan;

Hal. 9 dari 22 hal. Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2022/PA.Lik  
Selasa, 19 Zulhijah 1443 Hijriah / 19 Juli 2022 Masehi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, dan Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Lolak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Lolak berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasihati Pemohon I, Pemohon II, Anak Pemohon I, dan Anak Pemohon II, sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin sehingga disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah Pemohon I mohon agar Pengadilan Agama Lolak memberikan Dispensasi Kawin bagi anak laki-laki Pemohon I yang bernama **Aji Saputro**, usia 17 tahun 2 bulan 16 hari, untuk menikah dengan anak Pemohon II yang bernama **Rini Ponamon**, usia 18 tahun 1 bulan 6 hari atas alasan yang pada intinya dapat disimpulkan bahwa Anak Pemohon I dan Anak Pemohon II tersebut telah menjalin hubungan dekat. Sekarang hubungan keduanya sudah sangat erat dan Pemohon I dan Pemohon II telah mendaftarkan rencana pernikahan keduanya pada KUA Dumoga Barat, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan Anak Pemohon I dan Anak Pemohon II belum cukup umur, padahal Anak Pemohon I telah siap menjadi kepala rumah tangga,

Hal. 10 dari 22 hal. Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2022/PA.Llk  
Selasa, 19 Zulhijah 1443 Hijriah / 19 Juli 2022 Masehi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat ini ia telah bekerja sebagai Penambang dengan penghasilan per bulan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sedangkan Anak Pemohon II telah akil balig serta sudah siap menjadi Ibu Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan lebih dari satu tuntutan hukum ke dalam satu permohonan (kumulasi objektif), yaitu permohonan Dispensasi Kawin bagi anak laki-laki Pemohon I yang bernama **Aji Saputro**, dan Dispensasi Kawin bagi anak perempuan Pemohon II yang bernama **Rini Ponamon** agar keduanya dapat melangsungkan pernikahan, maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 575 K/Pdt/1983 tanggal 20 Juni 1984 yang abstraksi hukumnya adalah bahwa boleh dilakukan penggabungan (*samenvoeging*) baik kumulasi objektif maupun subjektif, asal terdapat *innerlijke samenhang* atau koneksitas erat di antaranya, dan ternyata dalam kasus ini, terdapat koneksitas erat, maka sebagai bentuk penegakan asas sederhana, cepat dan biaya ringan (*vide* Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman *jo.* SEMA Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung Tahun 2021 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Peradilan), serta untuk menghindari adanya disparitas Penetapan, dengan tetap berpedoman pada Pasal 8 Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka kumulasi permohonan tersebut dapat diterima dan akan diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan Anak Pemohon I, dan anak Pemohon II yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara keduanya telah terjalin hubungan percintaan sejak November 2021 dan saat ini Anak Pemohon II tengah hamil 5 (lima) bulan, serta keduanya telah yakin akan terjerumus dalam perzinahan apabila tidak segera dinikahkan, karenanya mereka berencana akan menikah, tidak ada larangan atau halangan pernikahan antara keduanya kecuali masalah umur, anak Pemohon I sudah siap dan setuju menjadi suami dan kepala rumah tangga bagi calon istrinya yang bernama **Rini Ponamon** yang memiliki perbedaan usia 10 bulan 20 hari, begitu pula Anak Pemohon II telah siap dan setuju menjadi istri dan ibu rumah tangga bagi calon suaminya yang bernama **Aji Saputro** dan keduanya sudah

Hal. 11 dari 22 hal. Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2022/PA.Lik  
Selasa, 19 Zulhijah 1443 Hijriah / 19 Juli 2022 Masehi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siap melaksanakan kewajiban sebagai suami istri dengan penuh tanggung jawab. Pemohon I dan Pemohon II pun merestui pernikahan keduanya dan siap membimbing;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas *actori incumbit probatio* yang terkandung dalam Pasal 283 R.Bg dan Pasal 1865 KUHPerdara yaitu barang siapa mempunyai sesuatu hak atau mengemukakan suatu peristiwa harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu, maka Hakim membebani Pemohon I dan Pemohon II untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan permohonannya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.13 serta 2 (dua) orang saksi yakni **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II berupa fotokopi cocok dengan aslinya, seluruhnya bermeterai cukup dan di-nazegelen, oleh karena itu bukti P.1 sampai dengan P.13 telah memenuhi syarat formal sebagaimana ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara dan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai sehingga dapat diterima sebagai bukti dan secara materiil akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Rosminah** (Pemohon I) adalah akta autentik yang menjelaskan identitas Pemohon I, yakni: nama, NIK, agama, status, pekerjaan, kewarganegaraan, dan tempat tinggal Pemohon I sehingga bukti tersebut telah pula memenuhi syarat materiil karena relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, maka terbukti bahwa identitas Pemohon I telah sesuai;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Asma Mashanafi** (Pemohon II) adalah akta autentik yang menjelaskan identitas Pemohon II, yakni: nama, NIK, agama, status, pekerjaan, kewarganegaraan, dan tempat tinggal Pemohon II sehingga bukti tersebut telah pula memenuhi syarat materiil karena relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna

Hal. 12 dari 22 hal. Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2022/PA.Lik  
Selasa, 19 Zulhijah 1443 Hijriah / 19 Juli 2022 Masehi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUHPdata, maka terbukti bahwa identitas Pemohon II telah sesuai;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama **Siton Ponamon** (Ayah Anak Pemohon II) adalah akta autentik yang menjelaskan bahwa **Siton Ponamon** telah meninggal dunia pada tanggal 03 Desember 2015 sehingga bukti tersebut telah pula memenuhi syarat materiil karena relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUHPdata, maka terbukti **Siton Ponamon** (Ayah Anak Pemohon II) telah meninggal dunia pada tanggal 03 Desember 2015;

Menimbang, bahwa bukti P.4 dan P.5 berupa Asli Surat Penolakan Perkawinan kepada wali **Aji Saputro** dan Asli Surat Penolakan Perkawinan kepada wali **Rini Ponamon** dari KUA Kecamatan Dumoga Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow, keduanya adalah surat keterangan yang isinya menjelaskan bahwa permohonan pendaftaran perkawinan **Aji Saputro** dengan **Rini Ponamon** ditolak karena calon mempelai pria dan calon mempelai wanita belum cukup umur (belum genap 19 tahun) sehingga bukti tersebut telah pula memenuhi syarat materiil karena relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu sesuai Pasal 296 RBg hakim berpendapat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*), maka dinyatakan terbukti bahwa Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dumoga Barat menolak permohonan pendaftaran perkawinan **Aji Saputro** dengan **Rini Ponamon** karena calon mempelai pria dan calon mempelai wanita belum cukup umur, oleh karenanya dengan bersandar pada asas *poin't de Interes poin't de action*, Pemohon I selaku orang tua **Aji Saputro** dan Pemohon II selaku orang tua **Rini Ponamon** mempunyai kepentingan hukum yang cukup untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa fotokopi Kartu Keluarga, atas nama **Suyatno**, adalah akta autentik yang isinya menjelaskan bahwa secara formal dan faktual Pemohon I bersama dengan anaknya yang bernama **Aji Saputro**, bertempat tinggal di xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx sehingga bukti

Hal. 13 dari 22 hal. Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2022/PA.Llk  
Selasa, 19 Zulhijah 1443 Hijriah / 19 Juli 2022 Masehi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah pula memenuhi syarat materiil karena relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, maka terbukti bahwa Pemohon I bertempat tinggal di xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Lolak sehingga perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Lolak;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa fotokopi Kartu Keluarga, atas nama **Sudin Paputungan**, adalah akta autentik yang isinya menjelaskan bahwa secara formal dan faktual Pemohon II bersama dengan anaknya yang bernama **Rini Ponamon**, bertempat tinggal di xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx sehingga bukti tersebut telah pula memenuhi syarat materiil karena relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, maka terbukti bahwa Pemohon II bertempat tinggal di Kabupaten Bolaang Mongondow yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Lolak sehingga perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Lolak;

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa fotokopi Akta Kelahiran atas nama **Aji Saputro** (Anak Pemohon I), adalah akta autentik yang isinya menjelaskan bahwa **Aji Saputro** lahir di Toraut pada tanggal 03 Mei 2005 adalah anak kandung ketiga dari **Suyatno** dan **Rosminah** sehingga bukti tersebut telah pula memenuhi syarat materiil karena relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, maka terbukti bahwa **Aji Saputro** saat ini masih berusia 17 tahun 2 bulan 16 hari atau belum mencapai usia 19 tahun dan Pemohon I selaku orang tua sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* untuk bertindak sebagai pihak yang berhak mengajukan permohonan Dispensasi Kawin sesuai Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Hal. 14 dari 22 hal. Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2022/PA.Llk  
Selasa, 19 Zulhijah 1443 Hijriah / 19 Juli 2022 Masehi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.9 berupa fotokopi Surat Keterangan Menikah atas nama **Suyatno** dan **Rosminah** dari Kepala xxxx xxxxxx xxxxx, adalah surat keterangan isinya yang menjelaskan **Suyatno** dan **Rosminah** telah menikah pada tanggal 10 Januari 2003, sehingga bukti tersebut telah pula memenuhi syarat materiil karena relevan dengan pokok perkara, dan sesuai Pasal 296 RBg hakim berpendapat, alat bukti tersebut hanyalah sebagai alat bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti P.10 berupa fotokopi Akta Kelahiran atas nama **Rini Ponamon** (Anak Pemohon II), adalah akta autentik yang isinya menjelaskan bahwa **Rini Ponamon** lahir di Ikhwan pada tanggal 13 Juni 2004 adalah anak kandung kedua dari **Siton Ponamon** dan **Asma Mashanafi** sehingga bukti tersebut telah pula memenuhi syarat materiil karena relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, maka terbukti bahwa **Rini Ponamon** saat ini masih berusia 18 tahun 1 bulan 6 hari atau belum mencapai usia 19 tahun dan Pemohon II selaku orang tua sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* untuk bertindak sebagai pihak yang berhak mengajukan permohonan Dispensasi Kawin sesuai Pasal 6 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa bukti P.11 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dumoga Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow, Nomor: 109/02/X/2016 tertanggal 04 Oktober 2016, adalah akta autentik yang menjelaskan bahwa **Suyatno** (Pemohon) dan **Rosminah** telah melangsungkan akad nikah dengan pada tanggal 04 Oktober 2016 dan tercatat pada tercatat pada KUA Kecamatan Dumoga Barat, bukti tersebut tidak memenuhi syarat materiil karena tidak relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu bukti tersebut patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.12 berupa fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama **Aji Saputro** dari Kepala Sekolah Menengah

Hal. 15 dari 22 hal. Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2022/PA.Llk  
Selasa, 19 Zulhijah 1443 Hijriah / 19 Juli 2022 Masehi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama Negeri Tapa Aog, Kecamatan Lolayan, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, adalah akta autentik yang menjelaskan bahwa **Aji Saputro** telah lulus jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama sehingga bukti tersebut telah pula memenuhi syarat materiil karena relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, maka terbukti bahwa **Aji Saputro** telah lulus jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama;

Menimbang, bahwa bukti P.13 berupa fotokopi Surat Keterangan Tamat SMP atas nama **Rini Ponamon** dari Kepala SMP 5 Negeri Dumoga, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, adalah surat keterangan isinya yang menjelaskan **Rini Ponamon** telah lulus jenjang pendidikan SMP, sehingga bukti tersebut telah pula memenuhi syarat materiil karena relevan dengan pokok perkara, dan sesuai Pasal 296 RBg hakim berpendapat, alat bukti tersebut hanyalah sebagai alat bukti permulaan;

Menimbang, bahwa saksi 1 (**SAKSI 1**) dan saksi 2 (**SAKSI 2**) yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II sudah dewasa, cakap atau berakal sehat, dan sudah bersumpah menurut tata cara agamanya, memberikan keterangan di persidangan secara terpisah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang secara material sama, pada pokoknya menerangkan antara anak Pemohon I dan anak Pemohon II telah menjalin hubungan, hubungan keduanya saat ini sangat dekat keduanya telah cocok dan berkeinginan untuk segera menikah. Rencana pernikahan ini murni keinginan keduanya, tidak ada unsur tekanan dan paksaan maupun transaksional didalamnya. Antara anak Pemohon I dan anak Pemohon II tidak ada hubungan nasab/sedarah, sepersusuan atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan, status anak Pemohon I adalah jejaka, sedangkan status anak Pemohon II adalah gadis, anak Pemohon I telah memiliki kesiapan mental untuk membangun rumah tangga dan siap untuk bertanggung jawab sebagaimana layaknya seorang suami dan menjadi kepala rumah tangga yang

Hal. 16 dari 22 hal. Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2022/PA.Llk  
Selasa, 19 Zulhijah 1443 Hijriah / 19 Juli 2022 Masehi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjukkan dengan telah bekerja, begitu pula Anak Pemohon II telah memiliki kesiapan mental untuk membangun rumah tangga dan siap untuk bertanggung jawab sebagaimana layaknya seorang istri atau menjadi ibu rumah tangga yang ditunjukkan dengan terbiasa membantu ibunya di rumah, keterangan tersebut, merupakan fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat material sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mendukung dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II serta dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 bersesuaian dan cocok serta saling melengkapi antara satu dengan yang lain, maka keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 307 dan Pasal 309 R.Bg, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang bebas (*vrij*) sesuai Pasal 1908 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang dikuatkan dengan bukti-bukti sebagaimana tersebut di atas, maka telah terbukti fakta sebagai berikut:

- 1 Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Lolak;
- 2 **Aji Saputro** lahir di Toraut pada tanggal 03 Mei 2005, saat ini masih berusia 17 tahun 2 bulan 16 hari, adalah anak kandung kedua dari **Suyatno** dan **Rosminah**;
- 3 **Aji Saputro** telah lulus jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
- 4 **Rini Ponamon** lahir di Ikhwan pada tanggal 13 Juni 2004, saat ini masih berusia 18 tahun 1 bulan 6 hari, adalah anak kandung kedua dari **Siton Ponamon** dan **Asma Mashanafi**;
- 5 **Rini Ponamon** telah lulus jenjang pendidikan SMP;
- 6 Status anak Pemohon I saat sekarang adalah jejak sedangkan anak Pemohon II adalah gadis yang tidak terikat dalam perkawinan dan pinangan orang lain;

Hal. 17 dari 22 hal. Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2022/PA.Llk  
Selasa, 19 Zulhijah 1443 Hijriah / 19 Juli 2022 Masehi



7 Anak Pemohon I dan anak Pemohon II tidak memiliki hubungan nasab/sedarah, ataupun sesusuan dan tidak ada larangan menurut agama maupun undang-undang dan peraturan yang berlaku untuk melangsungkan pernikahan, kecuali masalah umur;

8 Anak Pemohon I dan anak Pemohon II sudah menyatakan persetujuan untuk menikah tanpa ada paksaan;

9 Pemohon I dan Pemohon II merestui pernikahan keduanya dan siap membimbing;

10 Anak Pemohon I dan anak Pemohon II ingin segera melangsungkan pernikahan karena hubungan keduanya sudah sedemikian erat dan saat ini anak Pemohon II tengah hamil 5 (lima) bulan, serta keduanya telah yakin akan terjerumus dalam perzinaan apabila tidak segera dinikahkan, karenanya pernikahan tersebut sudah mendesak untuk dilaksanakan;

11 Secara fisik, mental, dan finansial keduanya mampu dan siap untuk melangsungkan pernikahan;

12 Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dumoga Barat menolak permohonan pendaftaran perkawinan **Aji Saputro** dengan **Rini Ponamon** karena kedua calon mempelai belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat konstatir fakta hukum bahwa **Aji Saputro** saat ini belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan namun keadaan sangat mendesak untuk ia segera melangsungkan pernikahan karena calon istrinya yang bernama **Rini Ponamon** telah dalam keadaan hamil 5 (lima) bulan disebabkan hubungannya dengan anak Pemohon I, dan keduanya telah yakin akan terjerumus dalam perzinaan apabila tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum di atas, akan diterapkan hukumnya (*dikonstituir*) dengan pertimbangan (kualifisir) sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitum kesatu permohonan ini mencakup seluruh petitum dalam permohonan, maka akan Hakim akan pertimbangkan setelah mempertimbangkan seluruh petitum Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Pasal 28 B ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menentukan bahwa setiap orang berhak

Hal. 18 dari 22 hal. Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2022/PA.Lik  
Selasa, 19 Zulhijah 1443 Hijriah / 19 Juli 2022 Masehi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, sehingga perkawinan yang merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan ikatan yang akadnya *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh/kuat), untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmah, bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Hakim berpendapat, anak Pemohon telah memenuhi syarat-syarat perkawinan, kecuali ketentuan kecuali syarat usia perkawinan dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pendapat Abu Jakfar Ath-Thahawi (ulama fikih) sebagaimana tercantum dalam kitabnya Syarhu Maani al-Atsar juz IV halaman 217 yang berbunyi: **حَتَّى يَأْتِيَ عَلَيْهِ تِسْعَ عَشْرَةَ سَنَةً**, yakni sampai ia berusia 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan pendapat Wahbah az-Zuhaili (ulama fikih) sebagaimana tercantum dalam kitabnya Fikih Islam wa Adillatuhu juz IX halaman 25 yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum, yang berbunyi sebagai berikut:

**يكون الزواج فرضاً إذا تيقن الإنسان الوقوع في الزنا لو لم يتزوج، وكان قادراً على نفقات الزواج من مهر ونفقة الزوجة، وحقوق الزواج الشرعية.**  
Artinya : Pernikahan menjadi wajib, ketika seseorang yakin akan jatuh ke dalam perzinaan jikalau tidak menikah, dan ia mampu untuk nafkahi istrinya berupa mahar dan nafkah serta hak-hak pernikahan lainnya;

Menimbang, bahwa anak Pemohon I dengan anak Pemohon II yang sudah lama dekat dan saling mencintai, bahkan anak pemohon I sudah hamil dan keduanya telah yakin akan terjerumus dalam perzinaan apabila tidak segera dinikahkan, sehingga keduanya telah sepakat akan melanjutkan ke jenjang pernikahan untuk membina rumah tangga. Bila pernikahan keduanya tidak segera dilaksanakan, berpotensi menimbulkan fitnah dan masalah dikemudian hari, maka demi kemaslahatan serta perlindungan dan kepentingan terbaik bagi keduanya, keduanya perlu segera untuk dinikahkan karena telah

Hal. 19 dari 22 hal. Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2022/PA.Lik  
Selasa, 19 Zulhijah 1443 Hijriah / 19 Juli 2022 Masehi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan pernikahan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 tahun 2019, selaras dengan kaidah fikih yang berbunyi: *الصَّرُورَاتُ تُبَيِّحُ الْمَحْظُورَاتِ*, yakni kondisi darurat memperbolehkan sesuatu yang semula dilarang, dengan mengambil pendapat Abdul Malik Karim Amrullah atau Hamka (ulama tafsir) dalam kitabnya Tafsir Al-azhar halaman 4933, dalam menafsirkan surat an-Nur ayat 32: jika pintu zina ditutup rapat, pintu kawin hendaklah dibuka, sehingga memberi dispensasi kepada kedua calon mempelai untuk menikah, didahulukan dari pada menolaknya dengan alasan kedua calon mempelai belum memenuhi syarat batas minimal usia perkawinan, hal ini selaras pula dengan kaidah fikih, yang berbunyi:

*دَرْءُ الْمَقَاسِيدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ*

Artinya: “Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa rencana pernikahan anak Pemohon I dengan anak Pemohon II merupakan kehendak dari kedua calon mempelai, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak mana pun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh keluarga masing-masing calon mempelai, serta anak pemohon II telah bekerja dengan penghasilan yang cukup, dipandang mampu untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dengan cara yang halal, sehingga rencana pernikahan tersebut telah pula mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 3 Konvensi Hak-Hak Anak telah yang disetujui oleh PBB tanggal 20 November 1989 dan diratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990, maka selaras dengan kaidah fikih yang berbunyi: *تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ*, yakni kebijakan pemerintah atas rakyatnya didasarkan pada kemaslahatan, serta mengambil pendapat Ibnu Taimiyah dalam kitabnya al-Fatawa al-Kubra juz III halaman 133, dalam mensyarahkan hadis *يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ*, (wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian berkemampuan untuk menikah, maka menikahlah) sebagai pertimbangan hukum, berbunyi:

*وَاسْتَطَاعَةُ التَّكَاحِ هُوَ الْقُدْرَةُ عَلَى الْمَتَوْتَةِ لَيْسَ هُوَ الْقُدْرَةُ عَلَى الْوَطْءِ،*

Hal. 20 dari 22 hal. Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2022/PA.Lik  
Selasa, 19 Zulhijah 1443 Hijriah / 19 Juli 2022 Masehi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Kemampuan menikah adalah kemampuan dalam hal biaya dan nafkah, bukan kemampuan dalam berhubungan badan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, permohonan Pemohon telah memenuhi Pasal 7 ayat (2), (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya Petitem Kedua permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara voluntair yang termasuk dalam bidang perkawinan, maka terhadap petitum ketiga permohonan Pemohon I dan Pemohon II, Hakim akan pertimbangkan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya, petitum ketiga permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan dengan membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II secara tanggung renteng masing-masing (1/2) seperdua dari biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh Petitem Permohonan Pemohon dikabulkan, maka Petitem Kesatu permohonan ini, beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa tata cara mengadili perkara *a quo* telah sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Memperhatikan, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada Anak Pemohon I (**Aji Saputro bin Suyatno**) untuk menikah dengan Anak Pemohon II (**Rini Ponamon binti Siton Ponamon**);
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp735.000,00 (tujuh ratus

Hal. 21 dari 22 hal. Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2022/PA.Lik  
Selasa, 19 Zulhijah 1443 Hijriah / 19 Juli 2022 Masehi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tiga puluh lima ribu rupiah) secara tanggung renteng masing-masing (1/2) seperdua bagian;

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Zulhijah 1443 Hijriah, oleh Alfian Muhammady, S.Sy. sebagai Hakim Pengadilan Agama Lolak. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Sri Rahayu Damiti, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Ridwan Olii, S.H.**

**Alfian Muhammady, S.Sy.**

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. ATK Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp600.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp10.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp735.000,00</b>

( tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah )

Hal. 22 dari 22 hal. Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2022/PA.Llk  
Selasa, 19 Zulhijah 1443 Hijriah / 19 Juli 2022 Masehi